

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA

ANALYSIS OF LOCAL REVENUE (PAD) IN THE CITY OF JAYAPURA

Luigi Laurens Derosario Berwulo¹, Vecky A. J Masinambow², Patrick C. Wauran³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115 Indonesia

Email : luigi12375@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura. Jenis penelitian dalam studi ini adalah Penelitian Deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya. Efektivitas penerimaan daerah terlebih pendapatan asli daerah terus menerus menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya, bahkan selalu menunjukkan angka efektivitas di atas 100 % setiap tahunnya sedangkan Kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan memang masih tergolong amat kecil, bahkan pada tahun awal penelitian berada pada angka dibawah 10 % dan angka kemandirian tertinggi masih berada pada angka 18 %, ini menunjukkan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya namun hal ini belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the development of regional revenue and to determine the level of independence, effectiveness and regional revenue growth in Jayapura. This type of research in this study is a descriptive study using financial ratio analysis area. The study concluded that the development of local revenue in the city of Jayapura since the beginning of the study until the end of the study continued to experience positive growth and growth that occurred even continues to increase every year. Effectiveness reception area especially local revenues continue to show the numbers of positive annually, and always shows the number efektivitas over 100% annually, while the independence of the city of Jayapura in terms of acceptance is still relatively very small, even in the early years of the study stood at below 10 % and the highest independence figure still stands at 18%, although this shows local revenues continue to grow positively Jayapura city every year but this has not been promised independence for the local revenue of the central government budget allocation is still very large.

Keywords: Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemda untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik, maka itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah.

Sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 2009 pasal 6 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah mereka sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut UU No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda). Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001:96).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk

menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan Kota Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua. Dalam rangka meningkatkan perekonomian otonomi daerah yang lebih nyata, maka dari berbagai sumber/sektor dan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah. Kesiapan Kota Jayapura sendiri dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya. Berikut ini tabel Pertumbuhan Pendapatan di Kota Jayapura dari tahun 2010 - 2014.

Tabel 1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun (2010-2014)

<i>Jenis Penerimaan</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Pendapatan Asli Daerah	50,575,675,159	61,854,199,232	76,887,003,661	100,225,833,150	134,479,078,476
Pajak Daerah	26,159,776,979	33,308,822,724	48,189,155,113	62,319,796,503	97,869,119,880
Retribusi Daerah	20,712,637,476	23,070,684,681	22,754,815,330	30,189,601,215	26,282,886,742
Hasil Pengolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2,384,426,605	2,398,836,501	2,085,078,817	3,715,521,584	4,825,279,014
Lain-lain PAD yang Sah	1,320,128,833	3,075,855,326	3,857,954,401	4,000,913,848	5,501,792,831
Dana Perimbangan	1,363,773,454,889	503,402,626,990	606,046,471,499	701,800,323,855	743,668,503,646
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64,140,253,889	64,654,511,990	65,517,514,499	12,961,528,821	67,295,484,646
Dana Alokasi Umum	1,267,484,701,000	392,375,115,000	496,265,717,000	586,198,486,000	624,312,379,000
Dana Alokasi Khusus	32,148,500,000	46,373,000,000	44,263,240,000	61,325,080,000	52,060,640,000
Lain Pendapatan yg Sah	132,731,855,855	150,942,858,776	162,804,270,086	201,334,100,150	250,333,124,640

Hibah	25,935,773	2,322,869,300	685,923,500	9,114,656,475	5,000,000,000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15,996,526,523	15,553,104,476	25,937,990,986	29,677,592,675	47,546,097,640
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	90,799,556,132	53,631,647,000	68,387,971,600	104,068,507,000	110,618,082,000

Sumber : *dispenda Kota Jayapura 2014*

Dilihat dari Tabel 1 laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini disebabkan potensi Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang semakin meningkat menuntut adanya peningkatan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura, maka kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat.

Tujuan Penelitian

”Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura dan Untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura ”

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Halim (2001 : 67) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2001 : 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam APBD

Salah satu penerimaan Pemerintah Kota/Kabupaten yang tercermin dalam APBD Pemerintah Kota/Kabupaten berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal apabila setiap tingkat pemerintahan daerah independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam system pemerintah daerah. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

Inti dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan daerah. Dalam hubungannya dengan pendanaan, desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal. Pendapatan asli daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dapat digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapata daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis terhadap laporan keuangan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat perkembangan suatu perusahaan guna meningkatkan kualitas dan kinerja keuangan. Analisis Laporan Keuangan menurut Harahap (2007:190) sebagai berikut Analisa laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif, maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis Laporan Keuangan menurut Soemarso (2005:380) sebagai berikut: Analisis laporan keuangan (*financial*

statement analysis) adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (*trend*) suatu fenomena”.

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan, dimana dalam menganalisis laporan keuangan sebenarnya mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Tujuan Analisis Laporan Keuangan Penting bahwa setiap analisis laporan keuangan mencakup membaca dengan seksama catatan laporan keuangan yang berguna untuk memberikan analisis tambahan dalam laporan tahunan dan dengan sumber informasi lain yang terpisah dari laporan tahunan. Menurut Harahap (2007:195) tujuan Analisis Laporan Keuangan sebagai berikut: Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah mendeskripsikan tentang pendapatan asli daerah Kota Jayapura.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kota Jayapura. Dipilih kota Jayapura dikarenakan Kota Jayapura merupakan Ibukota Provinsi Papua dan terus bertumbuh. Sementara untuk waktu penelitian dimulai bulan mei 2016 sampai dengan juli 2016.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:215) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Dalam hal ini populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah Kota Jayapura. Menurut Sugiyono (2012:81) menjelaskan definisi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam hal ini adalah sebagian dari Laporan Keuangan daerah selama periode 2009 - 2014.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Dalam hal ini analisis rasio yang dimaksud adalah menghitung rasio kemandirian, efektifitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk menghitung rasio keuangan daerah diperlukan laporan keuangan daerah sebagai referensi.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128). Rasio kemandirian diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}}$$

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan. (Widodo, 2001:270).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{P - P_0}{P_0}$$

r = Pertumbuhan

P_n = Data yang di hitung pada tahun ke –n (PAD tahun berjalan di Kota Jayapura)

P₀ = Data yang di hitung pada tahun ke – 0 (PAD tahun Sebelumnya di Kota Jayapura)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rasio Kemandirian

Tabel 2
Penghitungan Tingkat Kemandirian

Tahun	Total Sumber pendapatan dari pihak Ekstern	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian
2009	443.817.479.420	42.991.033.113	9.68 %
2010	432.267.840.000	50.575.675.159	11.70 %
2011	482.870.504.530	61.780.104.012	12.79 %
2012	585.308.822.530	76.887.003.661	13.13 %
2013	704.787.117.328	100.225.833.150	14.22 %
2014	739.766.243.328	134.479.078.467	18.17. %

Sumber : Laporan APBD Kota Jayapura Tahun 2009 – 2014 (Data diolah)

Melihat hasil perhitungan rasio kemandirian kota Jayapura diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian di kota Jayapura di mulai dari tahun awal penelitian yakni tahun 2009 masih berada pada angka kemandirian di bawah 10 % (persen) dan hanya mampu memperoleh angka kemandirian sebesar 9.68 %. Angka ini diambil berdasarkan rumus perhitungan kemandirian dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Jayapura pada tahun 2009 berjumlah sebesar 42.991.033.113 rupiah masih jauh dari kata mandiri saat dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksternal berupa dana perimbangan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah satu tingkat diatas, yang terbagi dalam berbagai alokasi anggaran seperti dana bagi hasil pajak dana bagi hasil bukan pajak, ataupun berupa dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum yang penggunaannya ataupun pengalokasiannya diserahkan kepada daerah dan bisa digunakan untuk kepentingan belanja pembangunan yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomiannya ataupun dalam bentuk dana alokasi khusus yang alokasi penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, ataupun untuk alokasi penanggulangan peristiwa luar biasa semisal bencana alam, atau program pemerintah daerah yang menyangkut kepentingan nasional yang sudah sebelumnya diusulkan ke pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan dari pihak eksteren adalah pendapatan lain sah maupun pinjaman daerah. Dimana ketika dibandingkan antara pendapatan dari pihak eksternal dan pendapatan asli daerah maka didapatkan hasil sebesar 9,68 % rasio kemandirian untuk tahun 2009 sedangkan untuk tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 2,02 % atau jumlah pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi 50.575.675.159 rupiah meskipun semestinya peningkatan ini tidak terlalu besar namun bisa mencapai angka peningkatan kemandirian sebesar 2 % lebih diakibatkan pada tahun yang sama juga terjadi penurunan pendapatan dari pihak eksternal menjadi 432.267.840.000.

Sedangkan pada tahun 2011 tingkat kemandirian kota jayapura juga mengalami peningkatan menjadi 12.79 % dari tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan 1.09 %. Hal ini bisa terjadi karena terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah sebesar 11.204.428.853 rupiah dari jumlah sebelumnya meskipun pada pendapatan dari pihak eksteren sendiri terjadi peningkatan sebesar

50.602.664.530 rupiah dimana hal ini bisa menjadi gambaran bahwa meskipun pada tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pendapatan asli daerah atau naik sebesar 10 % lebih namun secara keseluruhan hanya mampu meningkatkan kemandirian sebesar 1.09 % dikarenakan pada tahun yang sama juga terjadi peningkatan pada pendapatan dari pihak eksternal.

Pada tahun 2012 dan 2013 juga terjadi pertumbuhan yang cukup positif pada tingkat pendapatan asli daerah sehingga sedikit demi sedikit kota Jayapura mulai mengurangi tingkat ketergantungan pada alokasi dana transfer dari pusat, namun yang paling kelihatan adalah peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 menjadi 18.17 % dari angka tahun sebelumnya sebesar 14.22%. hal ini dapat terjadi karena pada tahun yang bersamaan terjadi peningkatan yang signifikan pada pendapatan asli daerah sedangkan pendapatan dari pihak eksternal tidak melonjak signifikan sehingga pertumbuhan bias terjadi.

Rasio Efektivitas

Tabel 3
Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas
2009	42.991.033.113	39.435.500.000	109.01 %
2010	50.575.675.159	50.500.000.000	100.14 %
2011	61.780.104.012	59.240.000.000	104.28 %
2012	76.887.003.661	66.627.000.000	115.39 %
2013	100.225.833.150	90.000.000.000	111.36 %
2014	134.479.078.467	115.000.000.000	116.93 %

Sumber : Laporan APBD Kota Jayapura Tahun 2009 – 2014 (Data diolah)

Dalam penghitungan rasio efektivitas yang dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pendapatan asli daerah sejak tahun awal penelitian 2009 hingga tahun akhir penelitian yakni 2014 selalu menunjukkan rasio efektivitas diatas 100 %, hal ini menjadi gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah di kota Jayapura semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya sekedar mencapai target pendapatan asli daerah yang memang sudah direncanakan sebelumnya namun selalu melebihi target. Bahkan pada tahun 2014 rasio efektivitas mencapai angka 116 %. Pertumbuhan efektivitas kota Jayapura dalam meningkatkan efektivitas yang dimiliki sendiri tak lepas dari peranan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi yang masuk ke daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat sedikit-demi sedikit mengalami pertumbuhan, dan bukan tidak mungkin dengan pertumbuhan yang cepat disertai pengelolaan yang professional maka kota Jayapura bisa sepenuhnya lepas dari ketergantungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kemandiriannya.

Rasio Pertumbuhan

Tabel 4
Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Jayapura 2009-2014 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan
2009	42.991.033.113	-
2010	50.575.675.159	17.64 %
2011	61.780.104.012	22.15 %
2012	76.887.003.661	24.45 %
2013	100.225.833.150	30.35 %
2014	134.479.078.467	34.17 %

Sumber : Laporan APBD Kota Jayapura Tahun 2009 – 2014 (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan yang dilakukan dalam table diatas didapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah kota Jayapura, terus mengalami pertumbuhan sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian. Pada tahun 2010 didapatkan hasil sebesar 17.64 % dari tahun 2009 atau pendapatan asli daerah kota Jayapura naik dari 42.991.033.113 rupiah pada tahun 2009 menjadi 50.575.675.159 rupiah pada tahun 2010. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2011 dimana jumlah pertumbuhan naik sebesar 22 % lebih dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini juga terus terjadi sepanjang tahun penelitian dan angkanya terus tumbuh setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah kota jayapura sepanjang tahun penelitian terus-menerus mengalami pertumbuhan. Bahkan pada tahun akhir penelitian mencatatkan hasil 34.17 % dari tahun sebelumnya.

Pembahasan

Pendapatan asli daerah (PAD) kota Jayapura sepanjang tahun penelitian yang dilakukan atau sepanjang tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Selain pertumbuhan yang terus membaik setiap tahunnya namun tingkat kemandirian di kota Jayapura sendiri masih tergolong rendah bahkan belum mencapai angka 20 % tingkat kemandirian. Angka tertinggi pada akhir tahun penelitian yang bias dicatat berada pada angka 18 %. Ini merupakan gambaran bahwa meskipun pertumbuhan yang positif terus terjadi setiap tahunnya di kota Jayapura namun tingkat pertumbuhan ini belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan akan pendapatan atau besaran dari jumlah pendapatan dari pihak eksteren sehingga tingkat kemandirian kota Jayapura masih amat kecil. Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang semakin baik tiap tahunnya, pendapatan asli daerah belum mampu menunjang sepenuhnya pengeluaran pemerintah kota jayapura dalam membiayai anggaran rumah tangganya. Namun apabila melihat pada rasio efektivitas yang ada dalam mendapatkan PAD, maka dapat dilihat bahwa efektivitas pemerintah kota Jayapura dalam mendapatkan PAD sudah amat baik bahkan dalam rasio selalu menunjukkan angka diatas 100 %, atau bisa diartikan bahwa pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah kota Jayapura selalu lebih banyak atau selalu di atas dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Terlepas dari semakin baiknya perekonomian kota Jayapura dengan terus tumbuh setiap tahunnya terutama dalam sektor pendapatan asli daerah, secara agregat sendiri PAD kota Jayapura masih amat kecil dan belum bisa menopang anggaran rumah tangganya sendiri dan masih bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah kota Jayapura perlu untuk meninjau

kembali kinerja sektor-sektor perekonomiannya sehingga penerimaan pendapatan pajak atau retribusi dari sektor-sektor perekonomian ini dapat dimaksimalkan, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan yang nantinya berdampak pada tingkat kemandirian daerah, dan tidak tergantung terlalu besar pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga nantinya program-program pemerintah daerah bisa semakin ditingkatkan, baik untuk pembangunan yang ada di daerah maupun untuk peningkatan mutu sumber daya manusia, atau bahkan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan bahkan pertumbuhan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penerimaan daerah di Kota Jayapura terlebih khusus dalam bentuk pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Efektivitas penerimaan daerah terlebih pendapatan asli daerah terus menerus menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya, bahkan selalu menunjukkan angka efektivitas di atas 100 % setiap tahunnya, hal ini jelas menjadi gambaran bahwa pemerintah kota Jayapura terus mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Bukan hanya untuk bisa mencapai target anggaran pendapatan bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah, sedangkan Kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan memang masih tergolong amat kecil, bahkan pada tahun awal penelitian berada pada angka dibawah 10 % dan angka kemandirian tertinggi masih berada pada angka 18 %, ini menunjukkan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya namun hal ini belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.

Saran

- a. Mempertahankan kinerja pengelolaan yang sudah tertata dengan baik di pemerintah kota Jayapura, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan daerah.
- b. Membuka sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan taraf kemandiriannya dan tidak terlalu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer, dan dengan adanya sumber-sumber ekonomi baru ini diharapkan belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura akan bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena dengan adanya sumber perekonomian yang baru maka tentunya akan menyerap tenaga kerja yang belum bisa terserap sebelumnya karena kurangnya kesempatan kerja.
- c. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas SDA yang didukung dengan sarana dan prasarana yang telah ada. Seperti meningkatkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pariwisata serta meningkatkan sarana akses pemasaran

baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDA ini maka penerimaan daerah juga akan meningkat.

- d. Selain itu kualitas SDM juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan untuk pengelolaan SDA yang lebih baik dan kesadaran akan penciptaan lingkungan kerja yang bersih dari penyelewengan dana untuk kas daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat memulihkan kondisi keuangan di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Badan Pusat Statistik, 2014. Produk Domestik Regional Bruto, Kota Jayapura.
- [2] Badan Pusat Statistik, 2011. Jumlah Penduduk, Kota Jayapura.
- [3] Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- [4] Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- [5] Harahap, Sofyan S. 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [6] Soemarso. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya